

KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENDIDIKAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN SIDOARJO

SOCIAL CONSTRUCTION OF EDUCATION AMONG THE FAMILY HOPE PROGRAM BENEFICIARY FAMILY IN SIDOARJO REGENCY

Munari Kustanto

Bidang Litbang dan Data, Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

E-mail: munarikustanto@gmail.com

Diterima: 28 Februari 2019, Direvisi: 12 Juli 2019; Disetujui: 31 Juli 2019

Abstrak

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk mendorong dan memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang ditentukan. Pemahaman KPM PKH tentang pendidikan dengan demikian menarik untuk dikupas. Pemahaman tersebut berkontribusi terhadap salah satu tujuan utama PKH yaitu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan pada dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik berbeda yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara *snowball*. Adapun data sekunder berupa dokumen terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari TKPKD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH terjadi dalam tiga momen yaitu eksternalisasi pengetahuan orangtua, objektivasi lingkungan sosial, dan internalisasi sebagai hasil sosialisasi internal dan eksternal informan. Tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Krembung. Konstruksi tentang pendidikan terbagi ke dalam empat kategori yaitu : pendidikan sebagai eksistensi sosial, pendidikan sebagai akses ekonomi, pendidikan sebagai jalan mobilitas vertikal, serta pendidikan sebagai warisan.

Kata Kunci: konstruksi sosial, makna, pendidikan, program keluarga harapan.

Abstract

Beneficiary Families (KPM) The Hope Family Program (PKH) has an obligation to encourage and motivate their children to continue their education to the specified level. An understanding of KPM PKH on education is thus interesting to explore. This comprehension contributes to PKH's main goal, which is fulfilling basic needs in education sector. This study purpose to know the social construction of education at PKH KPM in Sidoarjo Regency. Using a qualitative approach, the study was conducted in two sub-districts in Sidoarjo Regency which had different characteristics, that is Sidoarjo District and Krembung District. Primary data in this study were obtained through observation and interviews with informants who determined by snowball. And the secondary data was form a documents that is related to the implementation of PKH in Sidoarjo Regency from the TKPKD in Sidoarjo Regency, the Social Service of Sidoarjo Regency and UPPKH Sidoarjo Regency. The analysis already done using the theory of Social Construction from Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The results showed that the construction of education at PKH KPM occurred in three moments, which is externalization of parental knowledge, social environment objectivation, and internalization as a result of informants' internal and external socialization. There is no difference in social construction about education at PKH KPM in Sidoarjo District and Krembung District.

The construction of education is divided into four categories: education as social existence, education as economic access, education as a way of vertical mobility, and education as inheritance.

Keywords: social construction, meaning, education, the hope family program.

PENDAHULUAN

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2013-2015 tercatat setidaknya 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tidak memenuhi persyaratan (*non eligible*). Dalam hal ini dikarenakan sang anak tidak mau melanjutkan sekolah. Detail perkembangan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo yang tidak memenuhi persyaratan karena alasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perkembangan KPM PKH (*Non Eligible*) di Kabupaten Sidoarjo Karena Anak Tidak Melanjutkan Sekolah Tahun 2013-2015

No	Tahun	Jumlah	
		Non Eligible	Lokasi (Kecamatan)
1	2013	4	Krembung, Candi, Tarik, Sukodono
2	2014	13	Krembung, Tarik, Prambon, Jabon, Sidoarjo, Sedati, Buduran, Taman, Tanggulangin
3	2015	7	Krembung, Prambon

Sumber : UPPKH Kabupaten Sidoarjo, 2016

Memperhatikan tabel 1 di atas, terlihat ada dua hal yang menarik. *Pertama*, selama tiga tahun berturut-turut Kecamatan Krembung tercatat memiliki KPM PKH *non eligible*. *Kedua*, tercatatnya KPM PKH Kecamatan Sidoarjo yang notabene merupakan Ibukota Kabupaten.

Fenomena KPM PKH *non eligible* dengan penyebab anak tidak mau melanjutkan sekolah tidak hanya terjadi di Kabupaten

Sidoarjo. KPM PKH di Kota Probolinggo juga mengalami kondisi yang sama. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo, tercatat sebanyak 13 anak penerima PKH yang putus sekolah (“Sudah Terima PKH, Tiga Belas Siswa Penerima di Probolinggo Putus Sekolah,” 2015 akses 25 Maret 2016).

Di Kabupaten Ciamis juga ditemukan fenomena yang sama. Hasil penyisiran yang dilakukan petugas PKH Kabupaten Ciamis menemukan sebanyak 700 pelajar penerima PKH di 27 Kecamatan mengalami putus sekolah. Pelajar yang tidak melanjutkan pendidikan tersebut tersebar di semua jenjang pendidikan (Nurhandoko, 2017 akses 2 Mei 2017).

Beberapa fenomena yang berhasil dihimpun tersebut tentunya menyisakan pertanyaan. PKH sebagai sebuah program yang diharapkan mampu memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap pendidikan ternyata ditemukan fenomena yang cukup menarik. Sebuah fenomena yang kemungkinan juga terjadi di daerah lain.

Secara internasional PKH dikenal sebagai program *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Awalnya program ini dilaksanakan di Meksiko dengan nama *Progressa* pada pertengahan tahun 1990. Program ini kemudian berganti nama menjadi *Oportunidades*. Sejak itu, program BTB seperti ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, pengambil kebijakan, peneliti dan akademisi. Program ini terus dikembangkan, dipelajari, dievaluasi, dan kemudian direplikasi ke banyak program

serupa di berbagai negara (Nainggolan, 2012).

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Penerima PKH dalam pelaksanaan program lebih dikenal dengan KPM. Kepesertaan dalam PKH diharapkan akan membawa perbaikan pendapatan dan kualitas anak-anak dari KPM tersebut.

PKH mengembangkan misi pemberdayaan dan dirancang untuk memperkuat KPM agar mampu keluar dari kemiskinan melalui promosi kesehatan dan mendorong anak bersekolah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah dipilihnya ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak KPM sebagai penerima bantuan. Memperhatikan peran penting penerima bantuan dalam memperbaiki kualitas pendidikan khususnya pada anak-anak, tentu menjadi menarik ketika ditemukan fenomena anak-anak KPM yang tidak mau melanjutkan sekolah.

Konstruksi sosial yang dimiliki KPM PKH tentang pendidikan diharapkan mampu menjelaskan fenomena tersebut. Pemahaman atau pemaknaan mereka tentang pendidikan bagi anak-anaknya menentukan tindakan mereka dalam memotivasi dan mendorong anaknya untuk terus melanjutkan sekolah.

Keberadaan PKH telah menarik perhatian banyak pihak untuk mempelajarinya. Telah cukup banyak studi yang menjadikan PKH sebagai fokus pembahasan. Utamanya berkaitan dengan implementasi PKH dan dampaknya terhadap peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan penerimanya.

Salah satunya adalah penelitian dengan judul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektifitas PKH dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan pendidikan anak bagi keluarga RTSM/KSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga RTSM/KSM, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan pendidikan (Putri, 2014). Berbeda dengan studi yang menekankan pada aspek PKH sebagai sebuah program, maka penelitian kali ini cenderung menekankan pada pemahaman KPM mengenai pendidikan.

Studi lain yang lebih memfokuskan pada implementasi PKH di bidang pendidikan adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Studi yang dilakukan Syamsir (2014) bertujuan untuk (i) mendeskripsikan bagaimana proses implementasi PKH; (ii) menganalisis isi kebijakan serta lingkungan kebijakan dalam implementasi PKH; dan (iii) mengetahui hasil PKH terhadap kelompok sasaran. Hasil penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa pendamping selalu mengadakan pertemuan kelompok secara rutin, pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan pembayaran bantuan peserta PKH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKH bidang pendidikan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya.

Adapun studi yang berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat miskin tentang pendidikan juga telah ada. Penelitian Konstruksi Masyarakat Dusun Pelas, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tentang Pendidikan salah satunya. Penelitian

tersebut berusaha mengetahui kontruksi sosial masyarakat miskin tentang pendidikan. Hasil penelitian menemukan bahwa bagi masyarakat dusun Pelas pendidikan merupakan suatu jembatan yang membantu untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sebagai alat pemutus kemiskinan, di mana adanya kemiskinan tidak menjadikan orang tua berhenti menyekolahkan anak, akan tetapi mereka tetap berupaya dalam membiayai sekolah demi masa depan anak (Noviandari & Warsono, 2015). Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan masyarakat miskin sebagai subjek penelitian. Penelitian kali ini menjadikan KPM sebagai subjek penelitian.

Selanjutnya studi yang mengambil Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian juga cukup banyak. Salah satunya adalah penelitian dengan judul Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum proses pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan yang diadakan oleh BPMPKB Kabupaten Sidoarjo sudah dikatakan sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika pada aspek pemungkinan dan aspek penyokongan yang masih terdapat sedikit kekurangan dapat diperbaiki. Pada aspek pemungkinan berkaitan dengan peserta pelatihan keterampilan yang masih mencakup sebagian lapisan masyarakat sedangkan pada aspek pemeliharaan berkaitan dengan kegiatan yang berkesinambungan tiap tahun (Kurniawan & Tauran, 2015).

Terdapat pula studi yang membahas

secara spesifik PKH di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Meskipun demikian fokus penelitiannya lebih kepada mengidentifikasi pola pemanfaatan PKH di kalangan RTSM dan kinerja lembaga yang terlibat PKH. Penelitian berjudul Program Keluarga Harapan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pola pemanfaatan PKH di kalangan RTSM mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan RTSM, meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan balita, dan tak ada anak putus sekolah lagi. Kinerja lembaga yang terkait sangat membantu suasana yang kondusif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin (Irsalina, 2011). Kondisi tersebut berbeda dengan hasil evaluasi UPPKH Tahun 2016, di mana Kecamatan Krembung menunjukkan fenomena sebaliknya.

Meski kedua penelitian terakhir telah menjadikan Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Krembung sebagai lokasi penelitian. Keduanya belum memfokuskan perhatian pada konstruksi sosial yang dimiliki oleh penerima PKH atau KPM. Selain itu, penelitian kali ini juga menggunakan Kecamatan Sidoarjo sebagai salah satu lokasi penelitian.

Adapun penelitian yang memfokuskan pada pembahasan konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH masih belum ditemukan. Penelitian ini berusaha mengisi ruang yang masih kosong dalam upaya memberikan pengetahuan mengenai pemahaman atau pemaknaan tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih lagi Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Timur menjadi pertimbangan tersendiri. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis tentu ditunjang sarana prasarana pendidikan yang relatif baik. Memperhatikan berbagai hal di atas maka penelitian Konstruksi Sosial tentang

Pendidikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk dilaksanakan.

Penelitian ini berupaya mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada kalangan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Adapun masalah yang diteliti adalah bagaimana proses pembentukan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH. Selanjutnya adalah bagaimana pemahaman KPM PKH tentang pendidikan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian kali ini selain menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang sosial, khususnya dalam studi mengenai kemiskinan dan pendidikan melalui pendekatan konstruksi sosial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan guna meningkatkan manfaat PKH khususnya di bidang pendidikan.

Dalam penelitian ini teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan sebagai pisau analisis dalam upaya memahami tafsir KPM PKH tentang pendidikan. Pemikiran tentang konstruksi sosial tertuang dalam karya mereka *The Social Construction of Reality* yang dipublikasikan pada tahun 1966. Buku ini merupakan salah satu upaya Berger untuk menegaskan kembali persoalan mendasar dalam sosiologi pengetahuan (Riyanto, 2009). Melalui sosiologi pengetahuan inilah Berger meninjau hubungan antara individu dan masyarakat.

Salah satu usaha yang dilakukannya untuk mengembalikan hakikat dan peranan sosiologi pengetahuan adalah mendefinisikan kembali pengertian "kenyataan" dan "pengetahuan" dalam konteks sosial. Berger mendefinisikan "kenyataan" sebagai suatu kualitas yang

terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan "pengetahuan" didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger & Luckmann, 2013).

Kenyataan dalam hal ini merupakan fakta sosial yang bersifat eksternal, umum dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Kenyataan tersebut dengan demikian tetap ada, terlepas dari individu tersebut suka atau tidak suka. Adapun pengetahuan itu sendiri merupakan kenyataan yang hadir dalam kesadaran individu. Pengetahuan dengan demikian merupakan kenyataan yang bersifat subjektif (Samuel, 2012).

Pemahaman sosiologis mengenai "kenyataan" dan "pengetahuan" oleh Berger diposisikan berada di tengah-tengah antara pemahaman orang awam dan pemahaman filsuf (Berger & Luckmann, 2013). Sosiolog menurutnya harus lebih kritis daripada orang awam, namun kekritisan tersebut tidak sampai mengarah pada usaha pencarian kesahihan pernyataan tersebut mengenai dunia. Sosiolog bertugas mencari keterkaitan antara kondisi sosial dengan kenyataan dan pengetahuan. Guna memahami realitas yang unik dari masyarakat secara memadai, maka perlu diketahui proses bagaimana kenyataan ini terbentuk (Samuel, 2012).

Anak-anak KPM PKH yang tidak lagi mau melanjutkan sekolah merupakan sebuah realitas unik di masyarakat. PKH sebagai program yang diharapkan dapat mendorong anak-anak peserta PKH untuk terus bersekolah, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam upaya memahami realitas tersebut, maka penelitian ini berusaha mengetahui proses pembentukannya.

Sosiologi pengetahuan harus digunakan untuk menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai "pengetahuan" dalam masyarakat. Sosiologi pengetahuan dengan demikian harus berupaya membongkar apa yang "diketahui" oleh masyarakat sebagai "kenyataan" dalam kehidupan mereka sehari-hari yang tentunya tidak teoritis maupun prateoritis (Berger & Luckmann, 2013).

Sosiologi pengetahuan memusatkan perhatian pada pengetahuan akal sehat, bukan mengenai gagasan. Pengetahuan ini merupakan jaringan makna, di mana tanpa ini tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup. Sosiologi pengetahuan karenanya mengarahkan perhatiannya pada pembentukan kenyataan oleh masyarakat.

Realitas anak-anak KPM PKH yang tidak mau melanjutkan sekolah tentu tidak terlepas dari pengetahuan orangtua mereka tentang pendidikan. Makna yang mereka miliki tentang pendidikan inilah yang menjadikan perbedaan para penerima bantuan PKH dalam memotivasi anak-anak mereka untuk bersekolah. Proses pembentukan pengetahuan KPM PKH tentang pendidikan menjadi penting dalam upaya mengupas realitas yang ada.

Menurut Berger dan Luckmann, seseorang dalam kehidupannya mengembangkan sikap repetitif yang dikenal dengan "pembiasaan" atau habitualisasi (Berger & Luckmann, 2013).

Pembiasaan ini selanjutnya menimbulkan kesanpadakesadaran manusia bahwa hal tersebut merupakan hukum yang tetap. Pembiasaan ini pula yang menjadikan manusia dapat secara otomatis mengantisipasi suatu situasi tertentu. Tindakan-tindakan yang dijalankan pada tahap ini telah mengalami objektivasi dalam kesadaran mereka yang mempersepsikannya. Sebuah lembaga (institusi) pada momen ini

berdiri sebagai realitas objektif dalam kesadaran manusia dan juga di luarnya (Riyanto, 2009).

Berger kemudian menjelaskan bahwa dialektika antara manusia dengan masyarakat terjadi dalam tiga momentum yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Realitas pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia melalui momentum eksternalisasi dan objektivasi. Realitas sosial tersebut selanjutnya melalui momentum internalisasi berbalik membentuk manusia. Dalam proses dialektis seperti itulah realitas sosial muncul, bertahan dan berubah (Samuel, 2012).

Dalam eksternalisasi terjadi proses pencurahan pikiran dan kreativitas manusia ke dalam dunia. Berger mendefinisikan eksternalisasi sebagai suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisis maupun mental (Berger, 1991). Proses ini dilakukan karena tidak ada manusia yang terlahir sempurna dan memiliki dunianya. Kelahiran seorang manusia dalam hidup bukanlah kelahiran dunianya. Tahun-tahun pertama dan seterusnya ketika hidup, disitulah manusia akan membentuk dunianya.

Dapat dikatakan pula bahwa manusia memproduksi dunianya, yang kemudian menjadi sesuatu yang berada di luar sana. Pada momen inilah dunia manusia memperoleh realitas objektif, berupa produk-produk budaya yang material ataupun non-material. Namun objektivitas yang sama juga mencirikan unsur-unsur non-material di kebudayaan. Objektivitas masyarakat dalam hal ini mencakup semua unsur pembentuknya. Lembaga-lembaga, peran-peran, dan identitas-identitas itu eksis sebagai fenomena nyata secara objektif dalam dunia sosial, meskipun semua itu merupakan produksi manusia (Berger, 1991).

Momentum selanjutnya adalah internalisasi yang merupakan penyerapan ke dalam kesadaran dunia yang sudah terobjektivasi ke dalam kesadaran subjektif. Dalam hal ini manusia telah dapat memaknai dan mengekspresikan makna-makna kehidupannya tersebut. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, masyarakat menjadi suatu realita sui generis, unik. Sedangkan melalui internalisasi, manusia merupakan produk masyarakat (Berger, 1991).

Pemahaman tentang pendidikan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo tentu tidak terlepas dari ketiga momentum di atas. Bagaimana pendidikan bagi anak-anak di kalangan KPM PKH menjadi sebuah realitas objektif sekaligus menjadi realitas subjektif menjadi menarik untuk diulas. Melalui eksternalisasi dan objektivasi, KPM PKH menangkap pendidikan bagi anak-anak mereka sebagai sebuah realitas objektif. Selanjutnya melalui internalisasi yang dialami KPM PKH, pendidikan bagi anak-anak mereka berganti menjadi sebuah realitas subjektif. Keduanya tentunya sangat menentukan tindakan KPM PKH dalam memotivasi anak-anak mereka untuk dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

METODE

Penelitian ini berusaha memahami realitas sosial tentang pendidikan pada KPM PKH, maka pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Terdapat setidaknya dua inti dalam penelitian kualitatif, *pertama* menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. *Kedua*, kritis terhadap strategi dan metode positivisme (Denzin & Lincoln, 2009).

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung pada bulan Pebruari-Mei 2017. Kedua lokasi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda

baik dari aspek skala prioritas penanggulangan kemiskinan, demografi, hingga fasilitas pendidikan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah KPM PKH dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Ibu atau perempuan dewasa yang menerima bantuan PKH di Kabupaten Sidoarjo. Pembatasan ini didasarkan pada ketentuan bahwa yang berhak menerima bantuan PKH adalah ibu;
2. Memiliki anak, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah tidak mau melanjutkan sekolah sebagaimana diatur dalam pedoman umum pelaksanaan PKH;
3. Kepesertaan dalam PKH minimal lima tahun. Jangka waktu ini ditetapkan agar kemanfaatan program benar-benar sudah dirasakan oleh penerima PKH;
4. Jenis pekerjaan penerima PKH. Dalam hal ini terbagi dalam dua kategori yaitu penerima PKH yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan penerima PKH yang bekerja di sektor informal.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *snowball*, di mana peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan informal kepada Koordinator UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Setelah menjelaskan tujuan penelitian ini sekaligus kebutuhan datanya, peneliti kemudian meminta pertolongan untuk menunjuk satu orang yang bertugas sebagai pendamping di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Koordinator UPPKH Kabupaten Sidoarjo memberi kontak pendamping PKH Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung sekaligus data hasil validasi kepesertaan PKH tahun 2016.

Pendamping selanjutnya memberikan sejumlah nama KPM PKH di beberapa Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung yang sesuai dengan kriteria informan. Sejumlah nama yang diberikan

tersebut menjadi titik awal peneliti menelusuri informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Melalui penelusuran yang dilakukan, penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah informan. Data mengalami titik jenuh ketika peneliti telah melakukan wawancara terhadap 14 orang informan. Dengan demikian untuk penelitian ini peneliti menggunakan data hasil wawancara terhadap 14 orang informan terebut.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini analisis data bergerak dalam lingkaran spiral yang terdiri dari manajemen data, pembacaan, klasifikasi, dan penyajian (Creswell, 2015). Hasil wawancara yang telah ditranskrip selanjutnya diorganisir menjadi satuan-satuan teks yang sesuai ke dalam komputer sebagai database. Hasil transkrip tersebut dimaknai sebagai satu kesatuan, dengan membuat memo atau catatan dibagian tepi transkrip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial KPM PKH tentang Pendidikan : Antara Pendidikan dan Kebutuhan Ekonomi

Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya. Dalam hal ini merupakan makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann melihat hubungan antara manusia dan masyarakat lebih mengedepankan pandangan dialektik.

Menurut mereka, manusia di satu sisi menciptakan masyarakat dan di sisi lain masyarakat juga menciptakan manusia. Dengan kata lain masyarakat menurut Berger harus dipahami sebagai realitas objektif sekaligus realitas subjektif. Dialektika antara

manusia dengan masyarakat dijelaskan oleh Berger terjadi dalam tiga momentum yaitu ekternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi merupakan tahap permulaan sebuah konstruksi sosial dapat dipahami. Pengetahuan orangtua tentang arti penting pendidikan merupakan momentum awal yang membentuk konstruksi sosial informan. Orangtua informan dalam hal ini memandang pendidikan belum menjadi sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Pengetahuan mengenai pendidikan yang demikian tentunya tidak dapat dilepaskan dari kondisi kehidupan sosial ekonomi orangtua informan. Umumnya mereka juga memiliki latar belakang kondisi sosial ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan informan saat ini. Sebuah kondisi yang memaksa para orangtua informan untuk menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan keluarga. Pemenuhan urusan perut tentunya lebih diprioritaskan oleh para orangtua informan daripada pendidikan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan. Ibu ATI menjelaskan bahwa kondisi orangtuanya pada waktu itu juga tidak jauh lebih baik dari dirinya saat ini.

“...Inggih nek e saged inggih hehehe luwih dukur ngoten, tapi yok nopo nggih, keadaane ekonomine ngoten nggih cukup nggih niku wau...” (Iya kalo bisa ya hehehe lebih tinggi begitu, tapi bagaimana lagi ya, keadaan ekonominya seperti itu, ya cukup ya itu tadi...).

Kondisi yang demikian menjadikan informan tidak berani menuntut kepada orangtuanya untuk dapat meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Keadaan yang tidak jauh berbeda juga dikonfirmasi oleh informan lain, ibu TUT. Menurutnya tidak melanjutkan sekolah

merupakan upaya bagi keluarga untuk dapat menyambung hidup.

"...lha pripun malih mas, bapak tukang becak ibu mboten nyambut damel, yugone katah. Kulo kelas 2 SMP medal mas, soale isin mboten saged mbayar sekolah...". (lha bagaimana lagi mas, bapak seorang tukang becak, ibu tidak bekerja, anak banyak. Saya kelas 2 SMP keluar mas, soalnya malu tidak dapat membayar sekolah)

Informan juga menjelaskan bahwa selepas itu dirinya bekerja serabutan agar dapat membantu orangtua. Salah satunya adalah membantu membiayai adik-adiknya agar tetap bersekolah. Bahkan agar kebutuhan dasar anaknya dapat terpenuhi, ada salah satu adik informan yang dirawat oleh saudara dari orangtuanya.

Kondisi demikian ini merupakan pilihan paling logis pada saat itu. Sebagaimana keluarga miskin pada umumnya, keterbatasan ekonomi semakin diperparah oleh jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan lebih diprioritaskan daripada kebutuhan yang lain, apalagi pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hikmah, Quraisy, dan Arifin (2016) salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan anak. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang digeluti orangtua informan. Aristin (2015) juga mengemukakan pandangan serupa, bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah jenis pekerjaan orangtua dan jumlah keluarga yang harus ditanggung.

Jenis pekerjaan orangtua informan yang umumnya menghasilkan pendapatan terbatas, tidak sebanding dengan jumlah anggota

keluarga yang harus ditanggung menjadikan mereka fokus dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi ini juga diungkap oleh Budi dan Sidemen (2014) bahwa kesibukan orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin. Kondisi ini pula yang menyebabkan pemahaman sebagian masyarakat miskin akan pentingnya pendidikan sangat kurang.

Pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan pada saat itu terlihat sebagai hasil pencurahan pikiran dan kreativitas mereka dalam menghadapi kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. Pendidikan tidak ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi orangtua informan. Tindakan tersebut merupakan wujud dari *common sense* yang dimiliki orangtua informan maupun masyarakat miskin pada umumnya.

Dalam perjalanan kehidupan masyarakat miskin, pada umumnya pengetahuan tersebut kemudian terakumulasi menjadi sebuah *stock of knowledge*. Hal ini terbukti manakala orangtua informan dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pendidikan tidak menjadi sebuah prioritas untuk dipenuhi oleh mereka. Kondisi kehidupan menuntut mereka untuk memilih langkah *safety first* dalam kehidupan keluarganya.

Pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan yang demikian secara bersamaan menjadi sebuah realitas objektif. Tindakan yang mereka pilih untuk tidak mengutamakan pendidikan anak-anaknya merupakan sebuah kebenaran. Tindakan tersebut telah menjadi hal yang umum dilakukan oleh keluarga miskin.

Salah satu informan mengkonfirmasi pengetahuan orangtua mereka mengenai tindakan tersebut. Hal ini sebagaimana terlihat

dari penjelasan yang disampaikan ibu KAH berikut ini.

“...Boten anu mas, boten diandalaken... menawi bapak kulo riyen boten enten andalan kok, eh sekolah ngkok yok opo kedadeane ngkok, boten wonten...” (Tidak anu mas, tidak diandalakan...kalau bapak saya dulu tidak ada andalan kok, eh sekolahkah nanti bagaimana kejadiannya nanti,tidak ada)

Informan juga menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh keluarganya. Bagian sebagian besar keluarga seperti informan, pendidikan belum menjadi sebuah prioritas. Upaya membesarkan anak dari segi fisik menjadi prioritas utama orangtua informan dan orangtua lain yang kondisinya tidak berbeda dengan informan.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa ekternalisasi pengetahuan orangtua mengenai pendidikan telah berada pada tahap objektivasi. Kurang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sudah tidak lagi berada dalam tataran pengetahuan subjektif orangtua informan. Kurang pentingnya pendidikan bagi anak-anak telah menjadi sebuah realitas objektif yang umumnya dianut masyarakat miskin. Tindakan yang diambil orangtua informan dengan demikian menjadi sebuah wacana yang niscaya untuk dilawan.

Pada sisi lain, negara sebagai salah satu struktur sosial yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat berupaya mengubah pengetahuan masyarakat miskin tersebut. Sebagai sebuah struktur sosial yang juga merupakan hasil eksternalisasi masyarakat dan telah terobjektivasi, negara tentunya memiliki kekuatan untuk melawan wacana yang terlanjur dimiliki masyarakat miskin. Berbeda dengan masyarakat miskin, negara memiliki fungsi

terhadap kontrol sosial yang lebih baik. Hal ini didukung oleh berbagai pranata sosial yang dimiliki guna mendukung tugas negara.

Keberadaan PKH sebagai salah satu program untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat miskin merupakan salah satu wujud dari optimalisasi pranata sosial yang dimiliki negara. Dalam upaya menjalankan program tersebut mendapat dukungan bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga secara perundang-undangan. Selain peraturan yang menjadi haluan dalam pelaksanaan PKH, negara juga menerbitkan pedoman pelaksanaan PKH.

Dengan demikian pada tahap objektivasi terdapat dua realitas sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat miskin. Realitas pertama merupakan hasil eksternalisasi pengetahuan mereka tentang pendidikan. Realitas yang lain adalah hasil eksternalisasi pengetahuan negara tentang pentingnya pendidikan. Tahap internalisasi dengan demikian akan memegang peranan yang penting dalam membentuk pengetahuan informan tentang pendidikan.

Pendidikan sebagai sebuah realitas objektif baik yang dihasilkan oleh masyarakat miskin maupun yang dibentuk oleh negara selanjutnya akan mewarnai pengetahuan informan tentang pendidikan untuk anak-anak mereka. Pewarnaan pengetahuan tersebut terjadi melalui tahapan internalisasi. Sebagaimana diketahui bahwa internalisasi berlangsung seumur hidup dan terbagi menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

Sosialisasi primer dialami oleh informan manakala orangtua mereka menjelaskan keputusan untuk tidak memprioritaskan pendidikan. Sebagaimana telah disampaikan oleh informan sebelumnya, bahwa kondisi sosial ekonomi yang mereka hadapi pada waktu itu merupakan penghalang untuk dapat

mengakses pendidikan dengan lebih baik. Internalisasi pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan kepada informan dipahami sebagai sebuah kebenaran.

Pada proses sosialisasi internal ini, informan menyerap pengetahuan orangtua mereka sebagai sebuah kebenaran. Hal tersebut dapat dilihat dari respon para informan ketika orangtua mereka tidak terlalu memprioritaskan pendidikan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, informan cenderung menerima keputusan itu sebagai sebuah keputusan yang tepat. Sehingga dapat menyokong kelangsungan hidup keluarga.

Bahkan tidak jarang mereka selepas putus sekolah merelakan diri untuk bekerja membantu orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tindakan ini sebagaimana dikemukakan oleh ibu TUT selepas dirinya berhenti sekolah di jenjang kelas 2 SMP.

Seiring dengan perkembangan waktu, maka interaksi informan tidak hanya berputar pada keluarga dan lingkungan sekitar. Interaksi informan yang semakin meluas tentu juga disertai dengan terjadinya proses sosialisasi nilai dan informasi yang lain. Pada tahap inilah terjadi proses sosialisasi sekunder.

Banyak informasi dan pengetahuan yang tidak jarang berbeda dengan pengetahuan orangtua mereka mewarnai *stock of knowledge* informan. Termasuk pula dalam hal ini adalah pengetahuan mereka tentang arti penting pendidikan, khususnya bagi anak-anak mereka. Dengan demikian memungkinkan informan memiliki pengetahuan yang berbeda dengan orangtuanya.

Informasi yang disampaikan ibu ITA dapat dijadikan salah satu bukti bahwa sosialisasi sekunder turut mewarnai pengetahuan informan. Sejak meninggalkan kampung

halaman setelah putus sekolah, informan sempat merantau ke Kota Jakarta selama empat tahun. Setelah dari Kota Jakarta, informan melanjutkan petualangannya di Kota Surabaya selama tiga tahun sebelum kemudian ke Kota Malang selama hampir empat tahun.

“...Kulo elek-elek o masio boten anu kulo petualangan mas. Pendidikan niku boten rumongso kumpul boten kados kumpul tiyang sing boten berpengalaman boten perlu. Sing lebih baik berpengalaman, dapat digunakan, bermanfaat, berfaedah, ngono sistem kulo...” (Saya jelek-jelek gini meskipun tidak anu, saya petualangan mas. Pendidikan itu tidak merasa kumpul tidak seperti kumpul orang yang tidak berpengalaman tidak perlu. Yang lebih berpengalaman, dapat digunakan, bermanfaat, berfaedah, begitu sistem saya)

Berdasarkan interaksi-interaksi tersebut informan memiliki pengetahuan tentang pendidikan bagi anak-anak seperti saat ini.

Sosialisasi sekunder yang turut mewarnai pengetahuan informan akan pendidikan bagi anak-anak juga tidak dapat lepas dari peran para pendamping PKH. Bahkan dapat dikatakan sosialisasi sekunder yang dilakukan oleh para pendamping ini memegang peranan penting bagi pembentukan pengetahuan informan. Para pendamping PKH mempunyai tugas cukup mulia untuk membangun kesadaran KPM hususnya ibu tentang pendidikan anak-anak mereka.

Direkrut oleh Kementerian Sosial melalui seleksi secara terbuka, pendamping PKH menjadi kepanjangan tangan negara guna memastikan wacana pentingnya pendidikan yang diusung dalam program diterima oleh KPM. Tentang hal ini sebagaimana disampaikan ibu LIS berikut ini.

“...memotivasi, memotivasi untuk penerima

manfaatnya, KPM nya itu untuk lebih giat memberikan motivasi kepada anaknya untuk rajin sekolah..."

"Dia harus memenuhi semua komitmen di dalam persyaratan PKH, diantaranya kan harus rajin sekolah"

Para pendamping pula yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan pemanfaatan bantuan PKH.

Peran penting pendamping PKH juga diakui oleh seluruh informan. Mereka umumnya sangat berterimakasih kepada para pendamping yang tidak pernah lelah memotivasi dan mengingatkan KPM. Banyak pula pendamping PKH yang kemudian dianggap oleh informan sebagai saudara.

Keberhasilan pendamping PKH dalam menginternalisasi arti penting pendidikan kepada KPM berdampak pada menurunnya angka putus sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Juaranas (2017), di mana pendamping PKH menjadi salah satu dari empat faktor yang mendukung keberhasilan PKH mengatasi kasus putus sekolah. Nataya dan Supriyadi (2017) menambahkan bahwa pendamping PKH juga memiliki peran dalam meningkatkan keberdayaan KPM.

Pada tahapan inilah terjadi internalisasi terhadap arti penting pendidikan. Para informan memiliki pengetahuan tentang pendidikan yang berbeda dengan pengetahuan orangtua mereka. Pengetahuan informan dengan demikian sangat didominasi oleh proses interaksi sosial yang mereka jalani. Sosialisasi sekunder nampak lebih dominan dalam membentuk pengetahuan informan mengenai pendidikan bagi anak-anak.

Memperhatikan gambaran di atas, konstruksi KPM PKH tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pertaruhan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan pendidikan.

Membicarakan pendidikan sebagai sebuah realitas sosial, maka tidak dapat dilepaskan dari kegelisahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keberadaan PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat miskin tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka.

Bergelut Antara Eksistensi Sosial dan Warisan : Potret Pemahaman Penerima KPM PKH Tentang Pendidikan

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Kreembung masuk dalam kawasan pedesaan sedangkan Kecamatan Sidoarjo masuk kawasan perkotaan. Kecamatan Kreembung menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan permukiman, konservasi geologi, industri, pertanian dan perdagangan skala regional. Adapun Kecamatan Sidoarjo berfungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut menjadi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan di dua lokasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman KPM PKH tentang pendidikan terbagi dalam empat konstruksi pemahaman sebagai berikut : (a) pendidikan sebagai eksistensi sosial; (b) pendidikan sebagai akses ekonomi; (c) pendidikan sebagai jalan melakukan mobilitas vertikal; dan (d) pendidikan sebagai warisan.

Pendidikan Sebagai Eksistensi Sosial

KPM PKH yang memaknai pendidikan sebagai eksistensi sosial cenderung menganggap pendidikan sebagai sebuah kunci untuk dapat diterima di masyarakat. KPM PKH dengan konstruksi sosial seperti ini mendorong anak-anaknya melanjutkan pendidikan sebagai upaya untuk menghindari adanya sanksi sosial

dari masyarakat. Rasa malu dengan masyarakat sekitar menjadi alasan utama penerima PKH mendorong anak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Terlebih jika tingkat pendidikan anak penerima PKH lebih rendah dibanding dengan rata-rata pendidikan masyarakat disekitarnya.

Sanksi sosial berupa cibiran maupun gunjingan dari tetangga karena tingkat pendidikan yang rendah menjadi alasan utama penerima PKH mendorong anaknya untuk bersekolah. Konstruksi sosial tersebut sebagaimana tergambar dalam penuturan ibu BUY tentang pendidikan:

“...pendidikan niku penting...Isin lho mas aku, anakku gak sekolah. Soale kene iku kabeh sekolah...” (...pendidikan itu penting...Malu lho mas saya, anakku tidak sekolah. Karena di sini itu semua sekolah...).

Terlihat bahwa upaya untuk mendorong anaknya untuk kembali melanjutkan pendidikan lebih dikarenakan rasa malu dengan tetangga sekitar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, anak ibu BUY hanya menamatkan pendidikan SD.

Pengetahuan ibu WAT mengenai pendidikan juga tidak jauh berbeda. Meskipun memiliki semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya, tetapi dalam menempuh pendidikan lebih memperhatikan aspek sosial. Pendidikan dipahami hanya sebatas agar anak-anaknya memiliki pendidikan yang sama dengan teman-temannya. Hal sebagaimana terlihat dari penuturan ibu WAT berikut ini.

“...Pokok e sekolahe podo kalih koncone, perkoro mangan gak podo rodok rodok gak popo, pokok e sekolah kan ngoten” (Pokoknya sekolahnya sama seperti temannya, masalah makan tidak sama agak-agak tidak mengapa, pokoknya sekolah kan begitu)

“...Masi kulo boten sekolah boten nopo-nopo, pokok e anak kulo sekolah. Pokoke podo-podo kalih koncone...” (Meskipun saya tidak sekolah tidak apa-apa, pokoknya anak saya sekolah. Pokoknya sama-sama dengan temannya)

Penerima PKH ini juga menekankan upaya untuk menyekolahkan anak-anak agar memperoleh pendidikan yang lebih baik dibanding dirinya. Adapun ukuran lebih baik adalah sebagaimana pendidikan yang ditempuh teman-teman anaknya. Dengan demikian diharapkan anak-anak memiliki kepercayaan diri dalam hidup bermasyarakat karena memiliki jenjang pendidikan yang sama dengan mereka.

KPM yang memiliki konstruksi tentang pendidikan seperti ini cenderung menjadikan lingkungan sosial sebagai standar. Upaya mereka memotivasi anak untuk sekolah tidak lebih untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Manakala tidak terdapat sanksi sosial tersebut, maka niscaya KPM juga tidak terlalu mempermasalahkan pendidikan anak mereka.

Pendidikan Sebagai Akses Ekonomi

Pemahaman selanjutnya yang dimiliki KPM PKH tentang pendidikan adalah sebagai akses ekonomi. Mereka yang memiliki konstruksi sosial seperti ini cenderung mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan hanya demi mendapatkan pekerjaan. Fokus mereka hanya sebatas bagaimana anak mereka memperoleh pekerjaan. Pendidikan yang rendah mereka yakini sebagai penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Konstruksi sosial seperti ini dapat ditemui pada pemahaman ibu KAR yang merupakan penduduk asli Desa Sumput. Pendidikan menurut informan tidak lebih sebagai upaya untuk mendapatkan pekerjaan. Tentang pemahaman tersebut dapat dilihat dari

penuturan ibu KAR berikut ini.

“...Yok opo isok ku aku ngkok cik iso oleh ijazah... Wong anakku cik e duwe ijazah SMA mas, nek gak ngono angel golek penggawean...” (Bagaimana usaha saya nanti agar bisa mendapatkan ijazah... Supaya anak saya memiliki ijazah SMA mas, kalau tidak begitu susah mencari pekerjaan).

Konstruksi sosial tentang pendidikan sebagai modal untuk mendapatkan pekerjaan tidak hanya ditemui di Kecamatan Sidoarjo. Ibu KAR yang berasal dari Kecamatan Kreembung juga memiliki konstruksi sosial yang sama. Informan menuturkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang rendah maka seseorang akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Informan membandingkan dengan kondisinya, berbekal ijazah SMP ternyata sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

“...Penting nggih, nek entos ibukne biyen SMP anak e sampak dukur hehe...” (Penting ya, kalau bisa ibunya dulu SMP anaknya sampai tinggi hehehe).

Informan juga menambahkan penjelasan terkait masalah tersebut.

“...Nggih wong sak niki nyambut gawe kadang SMP wis boten saged, STM ae kadang iwuh nggihan, nek gak boten pinter arek e yok nopo...” (Ya sekarang bekerja menggunakan kadang SMP sudah tidak bisa, STM aja kadang susah juga, kalau tidak pinter anaknya bagaimana)

Pemahaman yang hampir sama juga dapat diketahui dari pendapat ibu IKA. Informan memahami pendidikan sebagai modal untuk mencari pekerjaan. Ibu rumah tangga dengan dua anak yang sedang menempuh pendidikan jenjang SMP dan MI menjadikan pekerjaan sebagai tujuan akhir pendidikan. “...Pendidikan

nggih niku pak...damel nyambut gawe nggih...”
(pendidikan ya itu pak...untuk bekerja ya).

KPM PKH dengan pemaknaan pendidikan sebagai modal dalam mencari kerja, cenderung mendorong anak mereka bersekolah hanya sebatas untuk mendapat pekerjaan. Mereka tidak terlalu mempermasalahan apakah pekerjaan tersebut dapat menjadikan kehidupan anaknya lebih baik. Mereka yang memiliki konstruksi sosial seperti ini juga tidak terlalu mempermasalahan jenjang pendidikan yang harus diselesaikan anaknya. Selama tingkat pendidikan tersebut sudah dapat digunakan untuk memiliki sebuah pekerjaan, maka KPM PKH tidak terlalu memperdulikannya.

Hal ini berbeda dengan pendapat Rasyid (2015) yang memandang pendidikan sebagai sebuah investasi bagi masa depan. Tujuannya adalah menciptakan manusia yang unggul melalui penentuan arah dan substansi pendidikan yang jelas hingga redesain pendidikan di Indonesia. KPM PKH yang memiliki pemahaman pendidikan sebagai akses ekonomi hanya memandang pendidikan sebatas alat untuk dapat terlibat dalam ekonomi.

Dikarenakan pendidikan belum dianggap sebagai sebuah investasi bagi masa depan anak-anak mereka, maka KPM PKH yang memiliki pemahaman ini tidak memikirkan arah maupun substansi pendidikan bagi anak-anak mereka. Selama pendidikan itu dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan maka cukup sudah. Mereka masih memegang asumsi bahwa pendidikan menjadi syarat untuk memperoleh pekerjaan. Andaikan jenjang pendidikan anak tersebut sama dengan informan, maka hal tersebut juga tidak terlalu dipermasalahan selama dapat digunakan untuk mengakses pekerjaan yang ada.

Pendidikan Sebagai Jalan Mobilitas Vertikal

KPM PKH yang memahami pendidikan sebagai jalan untuk melakukan mobilitas vertikal cenderung memahami pendidikan sebagai sebuah bekal yang harus dimiliki untuk dapat keluar dari kemiskinan. KPM PKH dengan konstruksi sosial seperti ini mendorong anak-anaknya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari mereka. Tujuan utamanya agar anak-anak tidak memiliki nasib seperti orangtuanya. Mereka menginginkan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak bergelut dengan kemiskinan seperti kondisi yang sedang dialami sekarang ini.

KPM PKH dengan konstruksi ini pada umumnya menganggap kehidupan yang sedang mereka jalani sekarang sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang mereka rengkuh. Pengalaman mereka mengenai sulitnya menempuh pendidikan menjadi pelajaran berharga untuk berupaya menghindarkan anak-anak mereka dari belenggu kemiskinan. Pendidikan dipercaya sebagai salah satu cara yang paling relevan untuk memutus belenggu kemiskinan.

Konstruksi pendidikan seperti ini dapat ditemui pada pemahaman ibu SEN yang mulai kecil hingga sekarang menetap di Jati Utara. Ibu tiga anak ini menganggap pendidikan penting sebagai salah satu cara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Informan sangat menyadari bahwa kehidupan yang sedang dijalani ini tidak terlepas dari rendahnya pendidikan yang diperoleh.

Informan sangat berharap anak-anak mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dari kedua orangtuanya. Pemahaman seperti ini dapat dilihat dari penuturan ibu SEN berikut ini.

“...Mangakaken kulo niki bade dateng yugo-yugo niki sagedto angsal pendidikan ingkang sae boten kados bapak e ngoten

lho...” (Oleh karena itu saya ini ingin ke anak-anak ini agar bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tidak seperti bapaknya begitu lho)

“...Mboten mpun dados kados tiyang sepahe kalih lah...” (Jangan sampai menjadi seperti kedua orangtuanya lah)

Konstruksi sosial seperti ini juga dapat dilihat dari pemahaman ibu ATI. Informan dan suami berharap anak mereka memiliki pendidikan yang jauh lebih baik dari orangtunya. Melalui pendidikan yang lebih baik inilah mereka berhadap derajat kehidupan anaknya juga dapat terangkat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan ibu ATI berikut ini : *“...Wong namine derajat. Derajate lare mboten semerap...”* (Namanya juga derajat. Derajatnya anak tidak tahu).

Informan dan suami juga tidak sependapat jika ada orang-orang yang memandang remeh masalah pendidikan. Tidak sedikit yang berpandangan bahwa orang miskin tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Padahal menurut informan melalui pendidikan inilah perubahan kondisi dapat diwujudkan.

“...Pikiran pikiran sing pendek niku nggih a? nek sing pikiran panjang oalah sekolah o mene-mene bek e derajatmu iso dukur kan mestine lak nggih ngoten sih...” (pikiran-pikiran yang pendek itu ya kan? Jika yang berfikir panjang oalah sekolah saja besok-besok mungkin derajatmu bisa tinggi kan seharusnya kan ya seperti itu sih)

Pemahaman tentang pendidikan sebagai modal untuk melakukan mobilitas vertikal juga dimiliki oleh ibu NUR. Berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan penjahit dengan seorang suami pekerja serabutan, kehidupan keluarga ini relative sama dengan keluarga miskin pada umumnya. Hal ini sebagaimana penuturan ibu NUR berikut ini.

“...Nggih pun boten kados kulo kalih bapak e mas. Pingine lebih apik teko wong tuwane, ben gak koyok ngene terus...” (Ya supaya tidak seperti saya dan bapaknya mas. Inginya lebih baik dari orangtuanya, biar tidak seperti begini terus).

Pendapat senada juga disampaikan ibu TUT. Pendidikan dianggap sebagai salah satu modal bagi anak untuk dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.

“...Kulo sekolahaken ngoten tok. Cik masa depane larene sik boten koyok ibu e ngeten hehehe...Nggih hehe sik boten sami kalih tiyang sepahe mas, cik e eco. Ibu e ngeten, bapak e ngeten hehe. Sik saged niki...” (Saya sekolahkan begitu aja. Supaya masa depan anaknya supaya tidak seperti ibunya begini hehehe... Ya hehe supaya tidak sama dengan orangtuanya mas, supaya enak. Ibunya begini, bapaknya begini hehe. Supaya dapat ini)

Selanjutnya pemaknaan yang sama tentang pendidikan juga dapat ditemukan pada penjelasan ibu KAH. Pendidikan menurut informan merupakan bekal yang harus dipegang agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana disampaikan ibu KAH berikut ini.

“...memange kulo boten gadah, ojok sampik koyok bapak dadi wong bodoh nak. Masi bapak buruh macul, pean yo kudu iso paling gak metu teko SMA...” (Memang saya miskin, jangan sampai seperti bapak menjadi orang bodoh nak. Meskipun bapak buruh tani, kamu ya harus dapat paling tidak lulus dari SMA)

“...Ojo sing wis koyok bapak biyen ga iso sekolah nak, sampeyan ae sekolah sing temen...” (Jangan yang sudah seperti bapak dulu tidak dapat sekolah nak, kamu saja sekolah yang benar).

Ibu WAT menjadi informan selanjutnya yang memiliki konstruksi pendidikan sebagai modal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Informan sangat menyakini bahwa melalui pendidikan yang lebih baik, maka anak keturunannya tentu akan memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Hal ini sebagaimana disampaikan informan berikut ini.

“...Mene-mene sumonggok o rumah tangga nek duwe anak ojok sampe sekolah, gak sekolah koyok aku...” (Besok-besok kalau sudah berumah tangga, jika memiliki anak jangan sampai sekolah, tidak sekolah seperti saya).

Pemaknaan pendidikan sebagai modal untuk mobilitas vertikal cenderung mendorong anak bersekolah demi memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Peran pendidikan sebagai jalan untuk melakukan mobilitas vertikal juga dikemukakan oleh Mukhlis dan Muslih (2009). Menurut mereka pendidikan tidak sebatas meningkatkan wawasan dan kemampuan individu. Pendidikan juga dapat menjadi jalur untuk meningkatkan strata sosial seseorang.

Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi maka lebih berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Melalui perbaikan penghasilan maka mereka juga berpeluang untuk meningkatkan status sosial mereka di masyarakat.

Para KPM PKH yang memiliki konstruksi seperti ini menyadari bahwa rendahnya pendidikan menyebabkan mereka terbelenggu kemiskinan. Pendidikan dipercaya KPM PKH sebagai salah satu bekal yang dibutuhkan anak mereka untuk memutus belenggu kemiskinan yang sudah menjerat keluarganya. Diharapkan anak-anak dapat meningkatkan status sosial (derajat) mereka di masyarakat melalui

pendidikan yang lebih tinggi dari orangtuanya.

Pendidikan Sebagai Warisan

KPM PKH yang memiliki pemahaman seperti ini cenderung mempunyai spirit yang tinggi dalam mendorong pendidikan bagi anak-anak mereka. Memperhatikan kondisi yang sedang mereka jalani saat ini, di mana masih bergelut dengan kemiskinan dan kekurangan. Pendidikan menjadi satu-satunya harapan yang dapat mereka berikan kepada anak keturunannya sebagai warisan.

Ibu NAH termasuk informan yang memiliki konstruksi sosial tentang pendidikan seperti ini. Menyadari keterbatasan materiil yang dimiliki, maka informan dan suami bertekad memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

“...Nek prinsip kulo, masih boten duwe dunyo pokok e saged madosaken yugane ngoten...nek kulo...” (Kalau prinsip saya, walaupun tidak mempunyai harta pokoknya dapat mencarikan – pendidikan – anaknya begitu...kalau saya...).

Tekad untuk dapat memberikan pendidikan terbaik bukan tanpa alasan. Informan menyadari hanya pendidikan terbaik yang dapat dipersembahkan kepada anak-anak mereka.

Adapun pendidikan seberapapun rendahnya tentu akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan mereka kelak.

“...Ilmu niku penting, nek dunyo iku sak ulan rong ulan kan mpun telas, nek e pendidikan, ilmu nopo, kan larene pados anu kiyambak meniko...” (Ilmu itu penting, kalau dunia itu satu bulan dua bulan kan sudah habis, kalau pendidikan, ilmu apa, kan anaknya mencari anu sendiri begitu).

Tidak akan lekang oleh waktu, maka pendidikan menjadi sebuah peninggalan yang harus diwariskan kepada anak-anaknya.

Hidup dalam keadaan yang pas-pasan ibu ITA juga memiliki kesamaan pemahaman mengenai pendidikan. Memperhatikan kehidupan yang jauh dari cukup, maka satu-satunya bekal yang dapat diwariskan kepada ketiga anaknya adalah pendidikan. Pemahaman seperti itu sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut.

“...Nek pendidikan niku saged, tiyang sepuhe goblok tapi nek anak e saged pintar. Tiyang sepuh boten saged nyukani dunyo, bondo, warisane ilmu pengetahuan, kepinteran niku wau mas. Niku sandang pangan sampai tua, sampai saged menurunkan anak cucu, ngoten nek saged niku” (Jika pendidikan itu bisa, orangtuanya goblok tapi kalau anaknya bisa pintar. Orangtuanya tidak dapat memberikan dunia, harta, warisannya ilmu pengetahuan, kepandaian itu tadi mas. Itu sandang pangan hingga tua, hingga dapat menurunkan anak cucu)

Pendidikan dalam hal ini oleh KPM PKH dipandang sebagai bekal untuk menjadi manusia seutuhnya. Syafaruddin (2017) juga mengemukakan pendapat yang serupa, di mana tujuan pembangunan adalah membangun totalitas kemampuan manusia. Dalam hal ini bukan hanya kemampuan sebagai individu tetapi juga kemampuan sebagai anggota masyarakat. Keberadaan pendidikan dengan demikian menjadi sangat penting sebagai salah satu hal yang harus dimiliki oleh keturunan KPM PKH.

Ketidakmampuan KPM PKH dalam memberikan peninggalan berupa materi atau kekayaan, menjadikan mereka berfokus pada pemberian bekal yang tidak kalah penting bagi kehidupan mereka. Pendidikan menjadi satu-satunya bekal yang dapat mereka berikan kepada anak keturunannya. Melalui pendidikan yang baik diharapkan anak KPM PKH dapat sukses menjalani kehidupan.

KPM PKH yang memiliki konstruksi sosial tentang pendidikan sebagai warisan cenderung memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak di atas kebutuhan yang lain. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Keterbatasan ekonomi yang umumnya menjadi penghalang dalam mengakses pendidikan para penerima PKH ternyata tidak menjadi kendala bagi mereka yang memiliki konstruksi sosial ini.

KESIMPULAN

Konstruksi sosial tentang pendidikan pada kalangan KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo terbentuk melalui tiga momentum. *Pertama*, eksternalisasi dari pengetahuan orangtua informan tentang pendidikan. *Kedua*, objektivasi dari *stock of knowledge* lingkungan sosial yang terdiri dari masyarakat miskin dan negara. *Ketiga*, internalisasi kepada informan sebagai hasil sosialisasi internal dan eksternal yang dilakukan KPM PKH.

Tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial di antara informan yang berasal dari Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Kreembung. Perbedaan geografis dan karakteristik wilayah ternyata tidak mempengaruhi konstruksi sosial KPM PKH tentang pendidikan. Setidaknya terdapat empat kategori pemahaman KPM PKH tentang pendidikan baik di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Kreembang. *Pertama*, pendidikan dipahami sebagai eksistensi sosial. *Kedua*, pendidikan dipahami sebagai akses ekonomi. *Ketiga*, pendidikan dipahami sebagai jalan mobilitas vertikal. *Keempat*, pendidikan dipahami sebagai warisan.

Dari keempat kategori pemahaman tentang pendidikan, KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo cenderung memiliki pemahaman kedua dan ketiga. Pendidikan dalam hal ini lebih banyak dipahami sebagai akses terhadap ekonomi

dengan memperoleh pekerjaan. Melalui pendidikan dan pekerjaan maka anak KPM PKH diharapkan dapat melakukan *mobilitas vertical*, sehingga ke luar dari kemiskinan.

SARAN

Memperhatikan konstruksi KPM PKH tentang pendidikan, maka PKH sebagai sebuah program masih dapat dikembangkan. Dalam hal ini PKH tidak hanya berhenti pada upaya pemberian bantuan kepada KPM. PKH dapat memainkan peran yang lebih besar baik sebagai fasilitator maupun katalisator. Fungsi sebagai fasilitator selama ini telah dijalankan dengan baik melalui pendamping.

Peran selanjutnya yang dapat diambil adalah menjadi katalisator bagi KPM untuk mewujudkan mimpi anak-anak mereka. Salah satunya membuat *link and match* sesuai dengan konstruksi yang cenderung dimiliki KPM. PKH dapat berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyediakan informasi lowongan pekerjaan bagi peserta PKH. Kolaborasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga dapat dilakukan guna memberikan kesempatan kepada peserta PKH untuk menempuh pendidikan tinggi.

Selanjutnya guna mendapatkan konstruksi yang lebih komprehensif, maka perlu dilakukan studi lanjutan guna mengetahui konstruksi sosial anak-anak penerima PKH. Dengan demikian pelaksanaan PKH kedepannya dapat memberikan manfaat bukan hanya kepada orangtua penerima PKH tetapi juga anak-anak penerima PKH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Emy Susanti, Dra., MA dan Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh dedikasi

memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis. Prof. Dr. I.B. Wirawan, Drs., SU dan Dr. Sutinah, Dra., M.S yang telah meluangkan waktu untuk mengkritisi dan memberikan saran bagi penyempurnaan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristin, N. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (Smp) Di Kecamatan Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20(1), 30–36. <https://doi.org/http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-geografi/article/view/5009>
- Berger, P. L. (1991). Langit Suci : Agama Sebagai Realitas Sosial. Penerjemah : Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2013). Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (10th ed.). Penerjemah : Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Budi, E. A., & Sidemen, I. G. (2014). Kendala-Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Miskin Dalam Mengakses Pendidikan Formal. *Jurnal Sosiologi*, 15(1), 63–71.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Di Antara Lima Pendekatan (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research (1st ed.). Penerjemah : Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmah, L., Quraisy, H., & Arifin, J. (2016). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV(2), 164–173. <https://doi.org/10.1002/hlca.19770600336>
- Irsalina, R. (2011). Program Keluarga Harapan: Studi Tentang Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga.
- Juaranas, A. (2017). Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengatasi Putus Sekolah Siswa Miskin Di Mts Swasta Insan Kesuma Lkmd Kecamatan Namo Rambe. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 189–198. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp>
- Kurniawan, D. A., & Tauran. (2015). Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 3(4), 1–17. Retrieved from <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11652>
- Mukhlas, M., & Muslih, M. (2009). Peran Sosial Pendidikan Dalam Mobilitas Vertikal Masyarakat Desa. *At Ta'dib*, 4(2), 249–270. Retrieved from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/593/530>
- Nainggolan, T. (2012). Program Keluarga Harapan di Indonesia : Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi (Juneman, Ed.). Jakarta: P3KS Press.
- Nataya, E. J., & N, S. S. (2017). Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan Di

- Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(2), 1–9.
- Noviandari, D., & Warsono. (2015). Konstruksi Masyarakat Dusun Pelas, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tentang Pendidikan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 01(03), 210–225.
- Nurhandoko. (2017, April). 700 Pelajar Peserta Program Keluarga Harapan Drop Out. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/14/700-pelajar-peserta-program-keluarga-harapan-drop-out-398990>
- Putri, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo Kota Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.
- Rasyid, H. (2015). Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Pendidikan Anak*, IV(1), 565–581.
- Riyanto, G. (2009). Peter L Berger : Perspektif Metateori Pemikiran. Jakarta: LP3ES.
- Samuel, H. (2012). Peter Berger : Sebuah Pengantar Ringkas. Depok: Kepik.
- Sudah Terima PKH, Tiga Belas Siswa Penerima di Probolinggo Putus Sekolah. (2015, July 2). *Bangsaonline.Com*. Retrieved from <https://www.bangsaonline.com/berita/12347/sudah-terima-pkh-tiga-belas-siswa-penerima-di-probolinggo-putus-sekolah>
- Syafaruddin. (2017). Sekolah Dan Transformasi Budaya Era Globalisasi. *Ijtima'iyah*, 1(1), 1–13.
- Syamsir, N. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Universitas Hasanuddin.